

ABSTRAK

Putusnya suatu perkawinan dapat menyebabkan timbulnya beberapa akibat hukum seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Pada proses pembagian harta bersama terdapat beberapa kasus yang mengalami kesimpangan hukum, seperti salah satu pihak terlebih dahulu menjual harta bersama tersebut kepada pihak ke 3 tanpa sepengetahuan pasangannya. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus putusan Pengadilan no. 435/PDT/2018/PT.SMG. Dalam Perkara ini terjadinya transaksi Perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang dijual tanpa sepengetahuan Turut Tergugat. Selain itu penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris/PPAT atas Perjanjian Jual Beli Harta Bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini Perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang tidak sah dikarenakan Obyek perjanjian tersebut merupakan Harta Bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Selain itu Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan telah membuat Sertifikat Hak Milik atas permintaan oleh para pihak yang menghadap serta telah memeriksa kebenaran formil berdasarkan berkas yang dibawa oleh para pihak.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Harta Bersama, Perjanjian Jual Beli

ABTRACT

The dissolution of a marriage can lead to several legal consequences such as child custody and joint property. In the process of dividing joint assets, there are several cases that experience legal irregularities, such as one party first selling joint property to a third party without the knowledge of his partner. This is as happened in the case of Court decision no. 435/PDT/2018/PT. SMG. In this case, a sale and purchase agreement transaction between the Plaintiff and the Defendant occurred over the Joint Assets between the Defendant and the Co-Defendant which were sold without the Co-Defendant's knowledge. In addition, this research discusses the responsibility of the Notary/PPAT on the Sale and Purchase Agreement of Joint Assets carried out by one of the parties. This research uses a normative juridical approach and the specification of the research used is prescriptive analysis. The result of this research is that the sale and purchase agreement between the Plaintiff and the Defendant is an invalid agreement because the object of the agreement is a Joint Asset between the Defendant and the Co-Defendants. In addition, the Notary/PPAT cannot be held accountable for having made a Certificate of Ownership at the request of the parties who appear and has checked the correctness of the formal based on the files brought by the parties.

Keywords: Unlawful Acts, Join Assets, Sale and Purchase Agreement